



diskominfo
Kabupaten Toba

RENCANA KERJA (RENJA- 2024)



**DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KABUPATEN TOBA**

Jln. Tarutung KM. 2 Kelurahan Soposurung



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Toba Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Sistematika Renja Perangkat Daerah adalah : Bab I Pendahuluan;
Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V Penutup
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan

- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi :
 1. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 2. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 3. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup :
 1. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi :
 1. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 2. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas-Dinas :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pertanian;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Badan-Badan :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
6. Kecamatan :
 - a. Kecamatan Tampahan;
 - b. Kecamatan Balige;
 - c. Kecamatan Laguboti;
 - d. Kecamatan Sigumpar;
 - e. Kecamatan Silaen;
 - f. Kecamatan Siantar Narumonda;
 - g. Kecamatan Porsea;
 - h. Kecamatan Uluan;
 - i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
 - j. Kecamatan Parmaksian;
 - k. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
 - l. Kecamatan Lumban Julu;
 - m. Kecamatan Ajibata;
 - n. Kecamatan Habinsaran;
 - o. Kecamatan Borbor;
 - p. Kecamatan Nassau.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 5 Juli 2023
BUPATI TOBA

Cap/Dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 5 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,
Cap/Dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

Cap/Dto

ANTHONY SIANIPAR, SH
PEMBINA
NIP. 19671217 200604 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
KATA PENGANTAR	13
Bab I. PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang.....	14
1.2 Landasan Hukum	21
1.3 Maksud dan Tujuan.....	27
1.4 Sistematika Penulisan.....	28
Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU	29
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra	29
2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.....	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .	32
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
Bab III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36

3.2 Tujuan dan sasaran RENJA SKPD	37
3.3 Program dan Kegiatan	38
Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	40
Bab V. PENUTUP.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022	29
Tabel T-C.30	Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	29
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	34
Tabel T-C.32	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	35
Tabel T-C.33	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024 Dan prakiraan maju Tahun 2025	39

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa atas rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, yang juga atas perkenan-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat progam, kegiatan, lokasi dan indikator kinerja serta pendanaan yang mengalami perubahan karena adanya perubahan dari sisi anggaran, indikator dan lainnya sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dokumen perencanaan tahunan sebagai pelaksanaan dan penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026. Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024 ini. Dokumen rencana kerja (Renja) ini diharapkan dapat menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2025.

Balige, 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TOBA,



SESMON TOBERIUS BUTARBUTAR, S.Pd, M.Si

MBINA TK.I

NIP. 19781023 200701 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

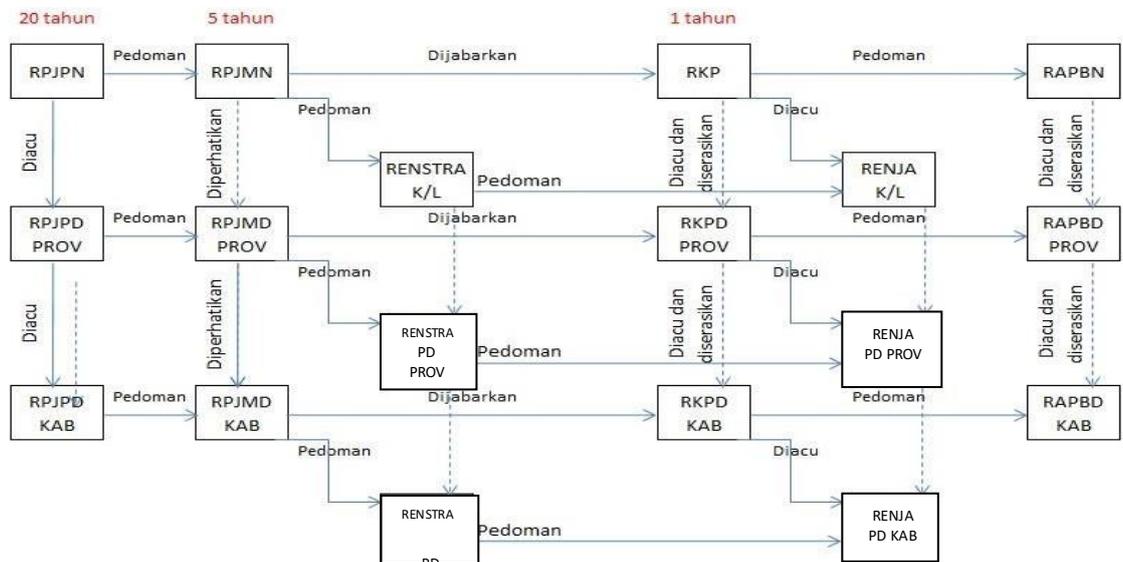
1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD Kabupaten Toba tahun 2024 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2024 yang merupakan indikator tahun ketiga RPJMD Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Toba untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Toba dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki.

perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024 dapat dilihat pada



gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba;

- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2022;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan;
- 8) Rancangan awal RKPD Kabupaten Toba tahun 2024;
- 9) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 10) Data Pokok Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba;
- 11) Informasi lain terkait pelayanan informasi publik.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator

dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba untuk kondisi tahun 2016-2021;

- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba tahun 2022

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan informasi publik.
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan informasi publik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan informasi publik;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan informasi publik;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum didalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Toba tahun 2024.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Toba.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

j. Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah

Dokumen rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
 24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Seri E Nomor 3 Tahun 2009);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
 27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, tujuan, sasaran, dan target sasaran beserta indikator sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi Rancangan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA SKPD yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu;

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD; Analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran dan Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;

Bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD; serta Program dan Kegiatan.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika;

Bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan untuk 5 (lima) tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

BAB V Penutup;

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Tingkat capaian pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba sampai dengan tahun 2022 adalah 26,28% dari target Renstra, persentase ini menunjukkan masih rendahnya program dan kegiatan di Renstra yang dapat terakomodir dalam Renja tahun 2022, hal ini diakibatkan keterbatasan anggaran dan adanya perubahan peraturan pemerintah.

Berikut terlampir tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 dalam tabel TC-29 berikut ini.

2.2. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba sebagai lembaga teknis daerah dalam penyelenggaraan tiga urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan informatika, Statistik, dan Persandian. Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba ditampilkan dalam tabel T-C.30.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- b. Penyusunan bahan rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik;
- d. Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kekomunikasian dan informatika, Persandian dan Statistik;
- e. Pengelolaan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- f. Pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- g. Pengelolaan ketata-usahaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- h. Pengelolaan perlengkapan dan kerumah-tangga Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- j. Pelaporan dan pertanggung-jawaban tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Struktur/ Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari;

- a. Kepala Dinas, jabatan pratama tinggi/ eselon IIb;
- b. Sekretaris, jabatan administrator/ eselon IIIa, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, jabatan pengawas/ eselon IVa; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik, jabatan pengawas/ eselon IVa.

- c. Bidang Aplikasi dan Infrastruktur, jabatan administrator/ eselon IIIb, terdiri dari:
 - 1. Seksi Aplikasi, jabatan pengawas / eselon IVa
 - 2. Seksi Infrastruktur, jabatan pengawas / eselon IVa;
- d. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, jabatan administrator/ eselon IIIb, terdiri dari:
 - 1. Seksi Aplikasi, jabatan pengawas / eselon IVa;
 - 2. Seksi Infrastruktur, jabatan pengawas / eselon IVa;
- e. Bidang Statistik dan Persandian, jabatan administrator/ eselon IIIb, terdiri dari:
 - 1. Seksi Statistik, jabatan pengawas / eselon IVa;
 - 2. Seksi Persandian, jabatan pengawas / eselon IVa;

Bidang Aplikasi dan Infrastruktur merupakan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas. Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan komunikasi dan Informatika dasar.

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi merupakan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur dalam pelaksanaan pembinaan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

Bidang Statistik dan Persandian merupakan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unsur dalam pelaksanaan pembinaan

Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan Bidang Statistik dan Persandian.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga teknis daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

1. SDM yang memahami Teknologi Informasi khususnya dalam bidang aplikasi sangat terbatas,
2. Pemanfaatan Teknonologi Informatika (e-Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal,
3. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal,
4. Kurang optimalnya perangkat daerah untuk memberikan data yang akurat dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data dalam pengumpulan data sektoral.
5. Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya keamanan informasi
6. Keterbatasan Anggaran, sarana dan prasarana yang memadai.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah,

maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan SDM baik dari segi kualitas dan kuantitas yang memahami teknologi informatika dengan melakukan pelatihan dan bimtek.
- b) Perekrutan tenaga ahli programmer untuk meningkatkan pembangunan aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika dan dari perangkat daerah lainnya.
- c) Melakukan sosialisasi pemanfaatan website dari masing masing perangkat daerah.
- d) Perbaikan dan penambahan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa sehingga pemerataan distribusi informasi dapat direalisasikan.
- b) Peningkatan kerjasama dengan media massa dalam penyediaan informasi.
- c) Pembentukan dan pemberdayaan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat berupa kelompok informasi masyarakat (KIM) dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan.
- d) Perbaikan sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebarannya melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis informasi (e-Government).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Toba, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun dengan tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dan sasaran Meningkatnya keterbukaan informasi publik, dan Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan berbasis Elektronik guna mewujudkan Toba Unggul dan Bersinar”.

Sebagai upaya mewujudkan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dalam pengelolaan Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian serta tugas lain di bidang Pemerintahan telah disusun rencana program kegiatan tahun 2023 yang terdiri dari 5 program dan 14 kegiatan serta 47 Sub Kegiatan.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba yang terdapat pada RKPD Tahun 2023. Salah satu upaya menilai keberhasilan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika perlu mereview program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD dari segi program dan kegiatan, target serta besaran pagu indikatifnya seperti tertuang dalam tabel T-C 31. berikut ini. (terlampir)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba melakukan penelaahan dan kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Toba yang pengusulannya ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Toba seperti tertuang dalam tabel T-C 32 berikut:

TABEL T-C.32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2024 KABUPATEN TOBA

OPD: Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	catatan
1	Tidak ada....				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Techno Economy, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan.

Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pembangunan IPTEK merupakan sumber daya terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumber daya manusia yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu IPTEK menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai.

Dengan demikian peningkatan kemampuan IPTEK sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara serta kemandirian dan daya saing Bangsa Indonesia di mata dunia. Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran komunikasi melalui sistem informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah apabila

tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Toba berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan sasaran RENJA SKPD

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2024, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan, sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari setiap misi ditetapkan tujuan dan sasaran RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024.

a. Tujuan :

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba untuk lima tahun kedepan adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

b. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba adalah Meningkatnya keterbukaan Informasi publik dan dan Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan berbasis elektronik.

Tujuan dan Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Indeks SPBE, Tingkat keterbukaan informasi publik dan nilai domain layanan SPBE

untuk mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah yang efektif & efisien dengan memberdayakan teknologi informasi, seperti aplikasi e-government, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dll.

3.3. Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatandan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 merupakan pelaksanaan operasional tahun Pertama dari RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba tahun 2023-2026 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2024, berdasarkan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba tahun 2021-2026. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba pada tahun 2024 dijabarkan dari Misi ke dua Kepala Daerah yaitu Membangun Sumber

Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal melalui kebijakan dan program. Secara lebih rinci rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2024 dituangkan dalam tabel T-C 33 (terlampir).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dituangkan dalam tabel Renja yang dientry dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berikut ini.

4.1 Program, Kegiatan , dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk 5 (lima) tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba terdiri dari 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan yang akan mendukung pencapaian indikator kinerja utama yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Indeks SPBE, Tingkat Keterbukaan Informasi Publik, dan Nilai Domain Layanan SPBE dalam rangka mendukung pencapaian Visi Bupati Toba yaitu TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR dan Misi ke dua Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal.

4.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan rencana Program, Kegiatan sampai dengan Sub Kegiatan 5 (lima) tahun yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba adalah acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) setiap tahunnya.

BAB V

PENUTUP

RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, Program dan Kegiatan, Indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya RENJA tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dengan berpedoman pada kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Balige, 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TOBA,



SESMON TOBERIUS BUTARBUTAR, S.Pd, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19781023 200701 1 004

Tabel. T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Toba

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2021						Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
2				82.495.028.233,00				15.909.164.503,00	4.181.660.710,00		0,26	0	4.181.660.710		0,05					
2	16			49.870.071.875,00				11.215.000.000,00	1.143.195.773,00		0,10	0	1.143.195.773		0,02					
2	16	2		4.972.950.000	%	100		1.205.000.000	0,00	103.891.500	0,00	0,09	0	103.891.500	0,00	0,02				
2	16	2	2.0 1	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan</i>	%	100	4.972.950.000		100	1.205.000.000	0,00	103.891.500	0,00	0,09	0	103.891.500	0,00	0,02	
2	16	3		44.897.121.875	%	100		10.010.000.000	0,00	1.039.304.273	0,00	0,10	0	1.039.304.273	0,00	0,02				
2	16	3	2.0 1	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara</i>	Sub Domain	45	27.293.471.875		45	5.530.000.000	0,02	952.653.132	0,00	0,17	0	952.653.132	0,00	0,03	
2	16	3	2.0 2	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sistem informasi yang ada</i>	Sistem Informasi	65	17.603.650.000			4.480.000.000	0,00	86.651.141	#DIV/0!	0,02	0	86.651.141	0,00	0,00	
2	20			2.575.000.000,00				250.000.000,00	7,00	19.341.658,00	1,00	0,08	7,00	19.341.658,00	0,20	0,01				
2	20	2		2.575.000.000	%	100		250.000.000	7,00	19.341.658	1,00	0,08	7	19.341.658	0	0				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2021			Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
				5		6		7		8		9 = (8/7)*100%		10 = (6+8)		11 = (10/5)*100%		
1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2 20 2 2.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kompilasi Data Statistik Sektoral	Jenis	35	2.575.000.000			7	250.000.000	7,00	19.341.658	1,00	0,08	7	19.341.658	0,20	0,01	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			100	2.095.000.000			60	250.000.000	0,00	72.660.614	0,00	0,29	0	72.660.614	0	0	
2 21 2	PROGRAM PENYELenggaraAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	100	2.095.000.000			60	250.000.000	0,00	72.660.614	0,00	0,29	0	72.660.614	0,00	0,03	
2 21 2 2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Informasi	%	100	2.095.000.000			100	250.000.000	0,00	72.660.614	0,00	0,29	0	72.660.614	0,00	0,03	
2 16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kinerja penunjang urusan pemerintah Daerah	%	100	27.954.956.358			100	4.194.164.503	3,13	2.946.462.665	0,03	0,70	3,13	2.946.462.665	0,03	0,11	
2 16 1 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	%	100	287.000.000			100	30.000.000	0,00	5.407.576	0,00	0,18	0	5.407.576	0,00	0,02	
2 16 1 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi Keuangan	%	100	15.259.611.925			100	2.345.000.000	25,00	1.837.122.638	0,25	0,78	25	1.837.122.638	0,25	0,12	
2 16 1 2.0 4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase target Retribusi	%	100	590.000.000			100	110.000.000	0,00	16.846.889	0,00	0,15	0	16.846.889	0,00	0,03	
2 16 1 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan aministrasi kepegawaian	%	100	210.000.000			100	30.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2 16 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi Umum	%	100	4.526.631.871			100	620.000.000	0,00	554.789.562	0,00	0,89	0	554.789.562	0,00	0,12	
2 16 1 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	100	2.002.712.562			100	279.164.503	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2 16 1 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja aparatur	%	100	2.770.000.000			100	435.000.000	0,00	364.452.431	0,00	0,84	0	364.452.431	0,00	0,13	
2 16 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik Daerah yang terpelihara	%	100	2.309.000.000			100	345.000.000	0,00	167.843.569	0,00	0,49	0	167.843.569	0,00	0,07	

TABEL T-C 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN TOBA

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks SPBE	Nilai Indeks			0	2,5	2,7	3,00	1,86	-	2,7	3,00	
2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Persen			0	60	65	70	71,90	-	65	70	
3	Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai Domain			0	2,5	2,7	3,00	1,86	-	2,7	3,00	

TABEL T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024
KABUPATEN TOBA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISA KEBUTUHAN													
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING					
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)	(12)					
2	16	01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	4.443.362.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	4.221.362.500	
2	16	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	55.000.000	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	40.000.000	
2	16	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.000.000	
2	16	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	20.000.000	
2	16	01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen	100	2.586.362.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Cakupan layanan administrasi keuangan	Persen	100	2.586.362.500	
2	16	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24	2.586.362.500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24	2.586.362.500	
2	16	01	2.04					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Target Retribusi	Persen	100	120.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase Target Retribusi	Persen	100	0	
2	16	01	2.04	04				Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Diskominfo	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	98	90.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Diskominfo	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	
2	16	01	2.04	07				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Diskominfo	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	30.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Diskominfo	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	
2	16	01	2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100	50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100	30.000.000	
2	16	01	2.05	11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskominfo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskominfo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30.000.000	
2	16	01	2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100	797.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Cakupan layanan administrasi umum	Persen	100	727.000.000	
2	16	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	
2	16	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	150.000.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN										
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING						
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskominfo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	20.000.000	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	166.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskominfo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	166.000.000	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50	40.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50	40.000.000	
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	30	75.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Diskominfo	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	30	75.000.000	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	266.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	266.000.000	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	Persen	100	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	Persen	100	50.000.000	
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50.000.000	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100	405.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100	408.000.000	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	175.000.000	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	250.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	230.000.000	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	380.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	380.000.000	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	170.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	170.000.000	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	180.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	180.000.000	
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskominfo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	30.000.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN										
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING				
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	95	5.063.750.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	95	5.063.750.000	
2	16	03	2.02		<i>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Diskominfo	<i>Jumlah sistem informasi yang ada</i>	<i>Sistem Informasi</i>	10	3.785.000.000	<i>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Diskominfo	<i>Jumlah sistem informasi yang ada</i>	<i>Sistem Informasi</i>	10	3.785.000.000	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	95.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	95.000.000	
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	70.000.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	70.000.000	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	2	2.000.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	2	2.000.000.000	
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	1	70.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Diskominfo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	1	70.000.000	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Diskominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	4	500.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Diskominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	4	500.000.000	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	300.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Diskominfo	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	300.000.000	
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	500.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	500.000.000	
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Diskominfo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	150.000.000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Diskominfo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	150.000.000	
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Diskominfo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	100.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Diskominfo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	100.000.000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	540.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Diskominfo	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	540.000.000	
2	20	02	2.01		<i>Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota</i>	Diskominfo	<i>Kompilasi data statistik sektoral</i>	<i>Jenis</i>	7	540.000.000	<i>Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota</i>	Diskominfo	<i>Kompilasi data statistik sektoral</i>	<i>Jenis</i>	7	540.000.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN										
	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING				
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	300.000.000	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	4	60.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	4	60.000.000	
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan statistik Sektoral dari BPS	Orang	100	120.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan statistik Sektoral dari BPS	Orang	100	120.000.000	
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Diskominfo	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	60.000.000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Diskominfo	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	60.000.000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintahan	Persen	70	600.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintahan	Persen	70	600.000.000	
2	21	02	2.01		<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Diskominfo	<i>Persentase Keamanan Informasi</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>520.000.000</i>	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Diskominfo	<i>Persentase Keamanan Informasi</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>520.000.000</i>	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	120.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	120.000.000	
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	2	100.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	2	100.000.000	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	150.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	150.000.000	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	44	150.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	44	150.000.000	Pengintegrasian Tanda Tangan Elektronik ke Sistem elektronik yang ada pada Perangkat Daerah
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Informasi yang diamankan	Jenis Informasi	2	80.000.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Informasi yang diamankan	Jenis Informasi	2	80.000.000	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	44	80.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	44	80.000.000	
										15.187.112.500					14.965.112.500		

TABEL T-C.33
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2024	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN							
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										9.597.112.500	9.914.068.125	DAU	DINAS KOMINFO		
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen				4.443.362.500	4.912.130.625	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen				55.000.000	65.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		20.000.000	20.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		35.000.000	45.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 Persen				2.586.362.500	2.714.630.625	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan		2.586.362.500	2.714.630.625	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Persentase Target Retribusi	100 Persen				120.000.000	120.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2,04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	98 Dokumen		90.000.000	90.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		30.000.000	30.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100 Persen				50.000.000	50.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		50.000.000	50.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Cakupan layanan administrasi umum	100 Persen				797.000.000	1.012.500.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		30.000.000	30.000.000	DAU	DINAS KOMINFO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2024	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN								
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	200.000.000	200.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	20.000.000	20.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	166.000.000	250.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dokumen	40.000.000	50.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30 Laporan	75.000.000	82.500.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	266.000.000	380.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba			Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100 Persen		50.000.000	100.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	100.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba			Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 Persen		405.000.000	465.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	160.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	300.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba			Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persen		380.000.000	385.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	170.000.000	175.000.000	DAU	DINAS KOMINFO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2024	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	SUMBER DANA	OPD PENANGG UNG JAWAB	JENIS KEGIATAN		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN								
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	180.000.000	180.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	30.000.000	30.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	70,20 persen			720.000.000	1.005.000.000	DAU	DINAS KOMINFO	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Persentase Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	18,90 Persen			720.000.000	1.005.000.000	DAU	DINAS KOMINFO	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi Publik	3250 Dokumen	550.000.000	700.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	02	2.01		Layanan Hubungan Media	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan	90.000.000	185.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen	80.000.000	120.000.000	DAU	DINAS KOMINFO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2024	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	SUMBER DANA	OPD PENANGG UNG JAWAB	JENIS KEGIATAN					
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN											
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 Persen						8.883.750.000	7.766.937.500,0 0	DAU	DINAS KOMINFO	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	45 Sub Domain					5.098.750.000	4.856.937.500	DAU	DINAS KOMINFO		
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45 Dokumen			35.000.000	40.000.000	DAU	DINAS KOMINFO	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	95 Unit			5.063.750.000	4.816.937.500	DAU	DINAS KOMINFO	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pemerintah Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Jumlah sistem informasi yang ada	10 Sistem Informasi						3.785.000.000	2.910.000.000	DAU	DINAS KOMINFO	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e- government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	1 Dokumen			95.000.000	100.000.000	DAU	DINAS KOMINFO	
### 2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen			70.000.000	80.000.000	DAU	DINAS KOMINFO	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pemerintah Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit			2.000.000.000	1.000.000.000	DAU	DINAS KOMINFO	
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen			70.000.000	80.000.000	DAU	DINAS KOMINFO	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2024	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN			
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN									
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba					Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	500.000.000	600.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba					Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba					Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba					Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100 Persen				540.000.000	630.000.000,00	DAU	DINAS KOMINFO
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pemerintah Kabupaten Toba	Kabupaten Toba			Kompilasi data statistik sektoral	7 Jenis			540.000.000	630.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	300.000.000	350.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba					Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen	60.000.000	65.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pemerintah Kabupaten Toba	Kabupaten Toba					Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	120.000.000	150.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba					Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	60.000.000	65.000.000	DAU	DINAS KOMINFO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2024	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	SUMBER DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	JENIS KEGIATAN			
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN									
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintahan	80 Persen					600.000.000	605.000.000	DAU	DINAS KOMINFO
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Persentase Keamanan Informasi	100 Persen				520.000.000	525.000.000	DAU	DINAS KOMINFO	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	120.000.000	125.000.000	DAU	DINAS KOMINFO				
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2 Laporan	100.000.000	100.000.000	DAU	DINAS KOMINFO				
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pemerintah Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	150.000.000	150.000.000	DAU	DINAS KOMINFO				
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pemerintah Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	44 Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	DAU	DINAS KOMINFO				
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Jumlah Informasi yang diamankan	2 Jenis Informasi	80.000.000	80.000.000	DAU	DINAS KOMINFO				
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	44 Perangkat Daerah	80.000.000	80.000.000	DAU	DINAS KOMINFO				
											15.187.112.500	14.919.068.125						

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOBA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						15.187.112.500,00							14.919.068.125,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.187.112.500,00							14.919.068.125,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						14.047.112.500,00							13.684.068.125,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 Persen		100 Persen	100 Persen	4.443.362.500,00						100 Persen	4.912.130.625,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 Persen		100 Persen	100 Persen	55.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	3 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	3 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	35.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	5 Laporan	45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan layanan administrasi keuangan</i>	100 Persen		100 Persen	100 Persen	2.586.362.500,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	24 Orang/bulan	2.714.630.625,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	24 Orang/bulan		24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.586.362.500,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	24 Orang/bulan	2.714.630.625,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Target Retribusi</i>	100 Persen		100 Persen	100 Persen	120.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	98 Dokumen	120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i>	98 Dokumen		98 Dokumen	98 Dokumen	90.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	98 Dokumen	90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Cakupan layanan administrasi kepegawaian</i>	100 Persen		100 Persen	100 Persen	50.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	5 Orang	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	5 Orang		5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	5 Orang	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan layanan administrasi umum</i>	100 Persen		100 Persen	100 Persen	797.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Paket	1.012.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Paket	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket		8 Paket	8 Paket	200.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	8 Paket	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	4 Paket	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket		4 Paket	4 Paket	166.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	4 Paket	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	40.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	50 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	75.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	30 Laporan	82.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	266.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	8 Laporan	380.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur</i>	100 Persen		100 Persen	100 Persen	50.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	5 Unit	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	5 Unit	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jasa Penunjang Kinerja Aparatur</i>	100 Persen		100 Persen	100 Persen	405.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	12 Laporan	465.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	-	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	12 Laporan	160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	12 Laporan	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	100 Persen		100 Persen	100 Persen	380.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	6 Unit	385.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	6 Unit		6 Unit	6 Unit	170.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	6 Unit	175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit		10 Unit	10 Unit	180.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	10 Unit	180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	5 Unit		5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	5 Unit	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten</i>	70,20 Persen		70,20 Persen	70,20 Persen	720.000.000,00						70,20 Persen	1.005.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan</i>	18,90 Persen		18,90 Persen	18,90 Persen	720.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	3250 Dokumen	1.005.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i>	3250 Dokumen		3250 Dokumen	3250 Dokumen	550.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	3250 Dokumen	700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan Hubungan Media</i>	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	90.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	2 Layanan	185.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														
			<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan</i>	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	80.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	3 Dokumen	120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<i>Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</i>	100 %		100 %	100 %	8.883.750.000,00						100 %	7.766.937.500,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kegiatan (event), Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara</i>	45 Sub Domain		45 Sub Domain	45 Sub Domain	5.098.750.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	45 Dokumen	4.856.937.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	45 Dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen	35.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	45 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	95 Unit		95 Unit	95 Unit	5.063.750.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	95 Unit	4.816.937.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sistem Informasi yang ada</i>	10 Sistem Informasi		10 Sistem Informasi	10 Sistem Informasi	3.785.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	2.910.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola</i>	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.000.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	2 Unit	1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	4 Unit		4 Unit	4 Unit	500.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	4 Unit	600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas														
			<i>Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Toba, Balige, Hinalang Bagasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						540.000.000,00							630.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>	100 %		100 %	100 %	540.000.000,00						100 %	630.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Kompilasi Data Statistik Sektoral</i>	7 Jenis		7 Jenis	7 Jenis	540.000.000,00			-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	630.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun</i>	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	4 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS</i>	100 Orang		100 Orang	100 Orang	120.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	100 Orang	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						600.000.000,00							605.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Tingkat Keamanan informasi pemerintahan Tingkat Keamanan informasi pemerintahan</i>	80 % 80 Persen		80 % 80 Persen	80 % 80 Persen	600.000.000,00						80 % 80 Persen	605.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Keamanan Informasi</i>	100 %		100 %	100 %	520.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	525.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Dokumen	125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	2 Laporan	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>	44 Perangkat Daerah		44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	150.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	44 Perangkat Daerah	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Informasi yang diamankan</i>	2 Jenis Informasi		2 Jenis Informasi	2 Jenis Informasi	80.000.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	44 Perangkat Daerah	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi</i>	44 Perangkat Daerah		44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	80.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	44 Perangkat Daerah	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
J U M L A H								15.187.112.500,00								14.919.068.125,00	